

# TESIS

## PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI SULAWESI BARAT

### *THE INFLUENCE OF FISCAL DECENTRALIZATION ON ECONOMIC GROWTH IN WEST SULAWESI PROVINCE*

disusun dan diajukan oleh

**KARIADI  
A042212005**



kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

# **TESIS**

## **PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI SULAWESI BARAT**

disusun dan diajukan oleh

**KARIADI  
A042212005**



kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2024**

## LEMBAR PENGESAHAN TESIS

### PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI SULAWESI BARAT

Disusun dan diajukan oleh

**KARIADI**  
**A042212005**

Telah dipertahankan dalam sidang ujian tesis  
tanggal 22 Januari 2024  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,  
Komisi Penasehat

Ketua

Anggota



Dr. Aini Indrijawati, SE.Ak.,M.Si.,CA  
NIP 196406091992031003



Dr. Sabir, SE.,M.Si  
NIP 19740715 200212 1 003

Ketua Program Studi Magister  
Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi  
dan Bisnis Universitas Hasanuddin

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin



Dr. Andi Ratna Sari Dewi, SE.,M.Si  
NIP 197209212006042001



Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE.,M.Si.,CIPM  
NIP 196402051988101001

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Kariadi  
NIM : A042212005  
program studi : Magister Keuangan Daerah (S2)

menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul:

**Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi  
di Provinsi Sulawesi Barat**

adalah karya ilmiah saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 23 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,



  
Kariadi

## **PRAKATA**

Puji syukur peneliti panjatkan kepada ALLAH Azza Wa Jalla atas berkat dan karunia-Nya serta salam shalawat kepada RASULULLAH Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Magister Sains (M.Si.) pada Program Pendidikan Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya tesis ini. Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada Ibu Dr. Aini Indrijawati, SE., Ak., M.Si., CA dan Bapak Dr. Sabir., SE., M.Si sebagai tim penasihat atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi, dan memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang telah dilakukan.

Ucapan terima kasih juga peneliti tujukan kepada Ketua Program Studi MKD FEB Unhas beserta jajaran dan Dewan Penguji sehingga penulisan tesis ini selesai sesuai waktu yang dijadwalkan. Pada kesempatan ini, penulis berterima kasih kepada rekan sejawat di program MKD FEB Unhas dan pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan. Semoga bantuan yang diberikan oleh semua pihak mendapat balasan dari Allah Azza Wa Jalla.

Terakhir, ucapan terima kasih kepada ayah dan ibu, Istri dan anak-anak tersayang beserta saudara-saudara peneliti atas bantuan, nasihat, dan motivasi yang diberikan selama penelitian tesis ini. Semoga semua pihak mendapat kebaikan dari-NYA atas bantuan yang diberikan hingga tesis ini terselesaikan dengan baik.

Tesis ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam tesis ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan tesis ini. semoga penelitian tesis ini dapat bernilai manfaat untuk penelitian selanjutnya dan semoga semua usaha menuju kesempurnaan selalu dituntun dan diridhoi oleh ALLAH.

Mamuju, 23 Januari 2024.

Kariadi

## ABSTRAK

KARIADI. *Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat* (dibimbing oleh Aini Indrijawati dan Sabir).

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat. Studi ini dilakukan di 6 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat dengan populasi penelitian, yaitu laporan keuangan pemerintah kabupaten. Penelitian menggunakan data panel (*pooled data*), yakni menggabungkan data *time series* dan *cross section* di enam kabupaten dalam kurun waktu tujuh tahun (dari tahun 2013 sampai dengan 2019). Jumlah sampel sebanyak 42 laporan keuangan pemerintah kabupaten se-Sulawesi Barat. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis *two stage least square* (2-SLS) menggunakan SPSS 23. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh positif dan signifikan dana bagi hasil dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal, sedangkan kemandirian keuangan daerah dan dana alokasi umum tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Selain itu, pada uji hipotesis tahap kedua, belanja modal terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat, khususnya melalui belanja modal. Implikasi penelitian ini dapat membantu pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Barat dalam menentukan arah kebijakan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan dalam rangka pertumbuhan ekonomi daerah.

Kata kunci: kemandirian keuangan daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, belanja modal, pertumbuhan ekonomi



## ABSTRACT

KARIADI. *The Effect of Fiscal Decentralization on Economic Growth in West Sulawesi Province* (supervised by Aini Indrijawati and Sabir)

The research aims at investigating the effect of the fiscal decentralization on the economic growth in West Sulawesi Province. The research was conducted in 6 regencies in West Sulawesi Province with the study population, namely the regency government financial statements. The research used the panel data (pooled data), namely: combining time series and cross section data in 6 regencies within the period of 7 (seven) years from 2013 to 2019, so that the samples were 42 financial statements of the regency governments in West Sulawesi. The data analysis method used in the research was 2SLS analysis (two stage least square) using SPSS 23. The research results indicate the positive and significant influence of the profit sharing funds and special allocation funds on the capital expenditure, while the regional financial independence and general allocation funds do not have the positive and significant effect on the capital expenditure. Moreover, in the test, the second stage hypothesis is that capital expenditure has proven to have the positive and significant influence on the economic growth. The research is expected to contribute to increasing the economic growth in West Sulawesi Province, especially through the capital expenditure. The implication of the research can help the regional governments in West Sulawesi Province in determining the policy direction towards the regional budget management to increase the development in the context of the regional economic growth

Key words: regional financial independence, profit sharing fund, general allocation fund, special allocation fund, capital expenditure, economic growth



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
PRAKATA .....	v
ABSTRAK .....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	13
1.3 Tujuan Penelitian .....	14
BAB II    TINJAUAN PUSTAKA .....	15
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep .....	15
2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi .....	15
2.1.2 Kemandirian Keuangan Daerah .....	16
2.1.3 Pendapatan Asli Daerah .....	19
2.1.4 Dana Perimbangan .....	20
2.1.5 Belanja Modal .....	22
2.2 Tinjauan Empiris .....	23
BAB III    KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS .....	27
3.1 Kerangka Konseptual .....	27
3.2 Hipotesis .....	30
BAB IV	
METODE PENELITIAN .....	34
4.1 Rancangan Penelitian .....	34
4.2 Situs dan Waktu Penelitian .....	34
4.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel .....	35
4.4 Jenis dan Sumber Data .....	35
4.5 Metode Pengumpulan Data .....	36

4.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional .....	36
4.7 Teknik Analisis Data .....	38
BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN .....	40
5.1 Analisis Data .....	40
5.2 Pembahasan .....	56
BAB VI	
PENUTUP .....	71
6.1 Kesimpulan .....	71
6.2 Saran .....	72
DAFTAR PUSTAKA .....	74
LAMPIRAN .....	77

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah di Provinsi Sulawesi Barat ..... 8
Tabel 1.1	Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah (PAD, DBH, DAU, DAK) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016-2021 ..... 9
Tabel 1.1	Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten di Sulawesi Barat Tahun 2016-2021 ..... 10
Tabel 4.1	Deskripsi Variabel ..... 37
Tabel 5.1	PDRB Kabupaten se Sulawesi Barat ..... 41
Tabel 5.2	Peta Kapasitas Fiskal Kabupaten se Sulawesi Barat ..... 43
Tabel 5.3	Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten se Sulawesi Barat ..... 44
Tabel 5.4	Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten se Sulawesi Barat ..... 44
Tabel 5.5	Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten se Sulawesi Barat..... 44
Tabel 5.6	Belanja Modal Kabupaten se Sulawesi Barat ..... 46

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

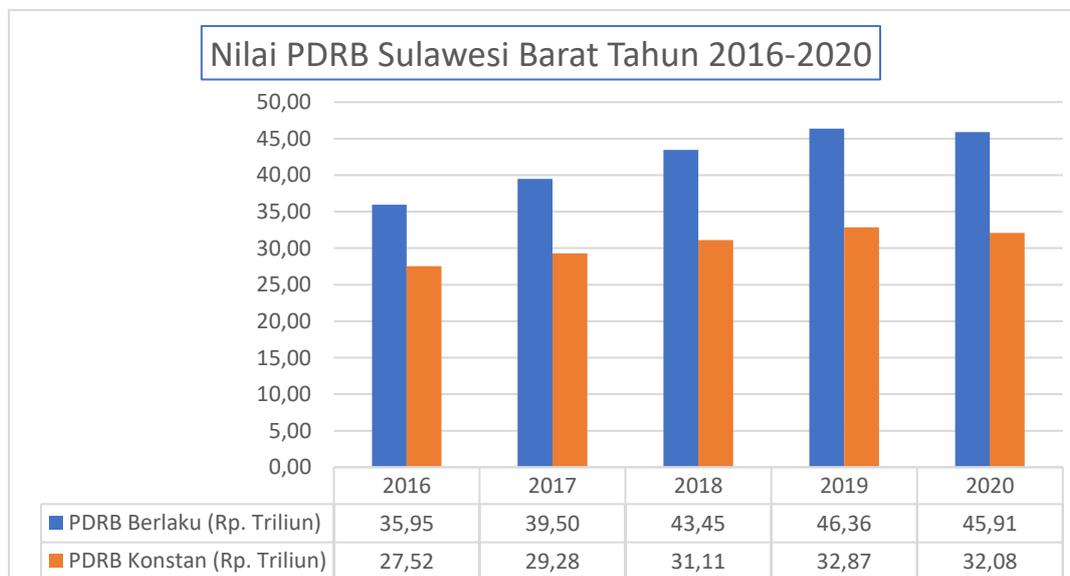
Otonomi daerah merupakan suatu kebijakan yang diatur oleh pemerintah pusat agar pemerintah daerah secara mandiri dapat mengelola pemerintahannya sendiri. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 (revisi menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014) dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 secara rinci dijelaskan bahwa pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri dalam mengurus pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan serta mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, baik dalam pembiayaan pembangunan maupun dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Sehingga Pengelolaan keuangan daerah diatur berdasarkan pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar susunan pemerintahan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Kemajuan suatu daerah dipengaruhi pula oleh seberapa baik pemerintah daerah tersebut mengelola keuangan daerahnya. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip *value for money* serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan perkembangan aktivitas perekonomian suatu daerah pada suatu waktu tertentu. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi menunjukkan semakin berkembangnya aktivitas perekonomian. Akan tetapi capaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi hendaknya bukan sebatas pada capaian saja, akan tetapi dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini dapat mencerminkan pencapaian tingkat

kesejahteraan masyarakat, seperti ketersediaan lapangan kerja, perkembangan indeks harga yang relatif terkontrol dan sebagainya.

Salah satu indikator statistik yang lazim dipergunakan untuk mengetahui keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah pada kurun waktu tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB dibedakan menjadi PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) dan atas dasar harga konstan (ADHK).

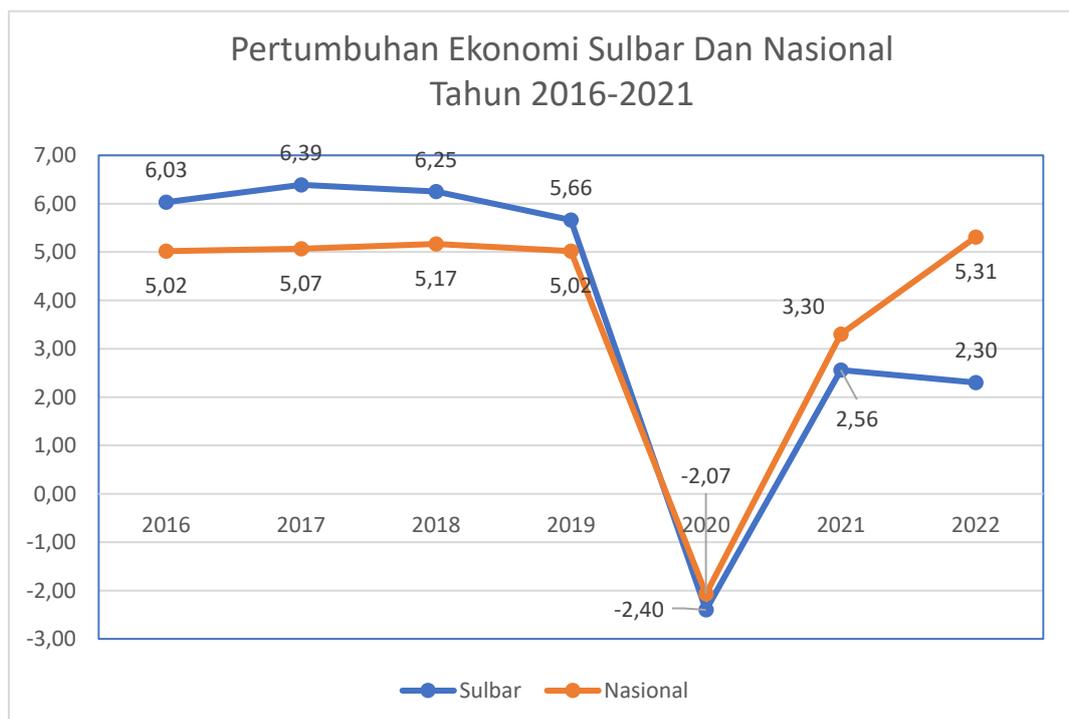


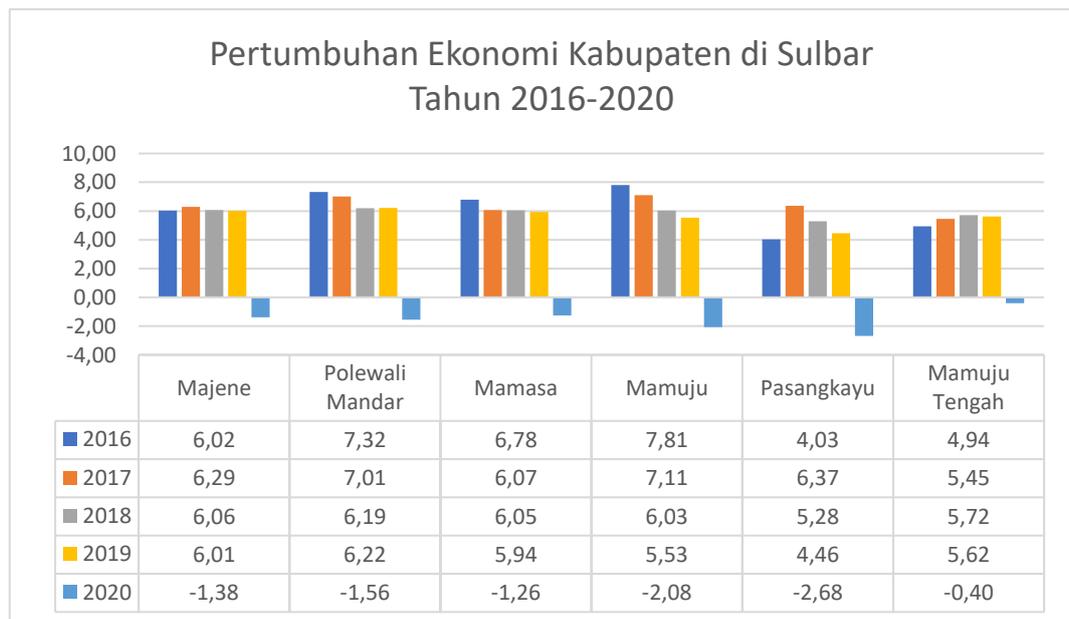
Pertumbuhan ekonomi mencerminkan perkembangan aktivitas perekonomian suatu daerah pada suatu waktu tertentu. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi menunjukkan semakin berkembangnya aktivitas perekonomian, akan tetapi capaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi hendaknya bukan sebatas pada capaian saja, tapi dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini dapat mencerminkan pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat, seperti ketersediaan lapangan kerja, perkembangan indeks harga yang relatif terkontrol dan sebagainya.

Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat sejak tahun 2018 sebenarnya mengalami tren menurun meskipun tidak signifikan, hingga di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat mengalami kontraksi

sebesar 2,40 persen. Kondisi tersebut sebenarnya juga berlaku secara nasional dimana rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional juga mengalami kontraksi sebesar 2,07 persen. Pada tahun 2021, Sulawesi Barat mengalami pertumbuhan yang positif sebesar 2,56 persen dan Kembali mengalami penurunan menjadi 2,30 persen di tahun 2022.

Meskipun berfluktuasi dan terjadi perbaikan kondisi seiring tumbuhnya perekonomian secara nasional, pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat masih tetap berada jauh di bawah pertumbuhan rata-rata nasional yaitu sebesar 3,71 persen pada tahun 2021 dan 5,31 persen di tahun 2022. Hal ini tentunya harus senantiasa didorong melalui upaya peningkatan sektor-sektor unggulan seperti lapangan usaha pertanian, lapangan usaha konstruksi, lapangan usaha industri pengolahan, lapangan usaha pertambangan dan penggalian serta lapangan usaha penyedia akomodasi dan makan minum. Upaya peningkatan tersebut tentunya harus melalui intervensi pemerintah daerah, yang tentunya harus ditopang dengan kemampuan keuangan yang memadai.





Pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat masih berfluktuasi namun masih tumbuh dengan positif hingga tahun 2019, meskipun mengalami kontraksi di seluruh kabupaten. Kabupaten Pasangkayu dengan tingkat pertumbuhan yang paling menurun dari seluruh kabupaten yang ada di Sulawesi Barat mengalami kontraksi sebesar 2,68 persen tahun 2020.

Dalam mengisi dan melaksanakan pembangunan, masalah keuangan merupakan masalah pokok pemerintah, terutama dalam kaitannya dengan aspek penerimaan dan pengeluaran yang harus dilakukan oleh pemerintah demi kesejahteraan masyarakat. Aspek keuangan merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Kemampuan daerah yang dimaksud adalah seberapa besar daerah dapat menggali sumber-sumber keuangannya sendiri untuk membiayai kebutuhan daerah, tanpa harus selalu menggantungkan diri pada bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh daerah yang bersangkutan. Dalam

kaitannya dengan pemberian otonomi daerah yang lebih besar kepada daerah. PAD selalu dipandang sebagai salah satu kriteria untuk mengukur ketergantungan suatu daerah kepada pemerintah pusat karena sebagai sumber pendapatan yang murni berasal dari daerah. Pada prinsipnya semakin besar sumbangan PAD kepada APBD maka akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat.

Desentralisasi fiskal melalui otonomi daerah diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah yang kemudian direvisi kembali melalui UU No. 32 dan 33 Tahun 2004. Tujuan penerapan desentralisasi yaitu untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, mengurangi ketidakstabilan makro ekonomi, serta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, karena desentralisasi merupakan salah satu solusi untuk dapat membuat sistem kelembagaan serta mengakomodasi preferensi penduduk dengan anggaran pemerintah yang ada.

Desentralisasi dapat berjalan optimal jika daerah otonom memiliki kemampuan finansial yang memadai. Kemampuan finansial memadai yang dimiliki setiap daerah atau yang sering disebut dengan kemandirian fiskal merupakan tolak ukur apakah daerah tersebut berhasil dalam pelaksanaan otonomi di daerahnya.

Potensi fiskal serta kemandirian daerah yang dimiliki oleh setiap daerah berbeda-beda. Selain itu pemberlakuan otonomi daerah juga tidak hanya diperuntukan untuk suatu provinsi namun juga suatu Kabupaten dan Kota. Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah untuk memperkecil kesenjangan antar daerah yaitu menerapkan aturan pembangunan daerah melalui konsep kawasan andalan yang dilakukan berdasarkan potensi yang

dimiliki oleh daerah masing-masing. Dengan kebijakan tersebut, keseimbangan akan meningkatkan pertumbuhan daerah dan pendapatan per kapita masyarakat. Adanya kebijakan ini diharapkan terjadi pemerataan pendapatan daerah, sehingga dapat menutup atau paling tidak mempersempit ketimpangan dan kemiskinan di daerah (gap) antara perkembangan ekonomi daerah Jawa dan luar Jawa serta Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI) (Kuncoro, 2004).

Kapasitas fiskal daerah yaitu kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu, sesuai Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 116/PMK.07/2021.

Kapasitas fiskal daerah sebagai unsur dalam penyusunan peta kapasitas fiskal daerah. Sesuai dengan Pasal 1 angka 2 PMK 116/PMK.07/2021 tentang peta kapasitas fiskal daerah yaitu gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan indeks kapasitas fiskal daerah.

Dalam penggunaan peta kapasitas fiskal daerah, mengikuti Pasal 2 ayat (1), bisa digunakan dalam 3 kebutuhan, sebagai berikut:

1. Pertimbangan dalam penetapan daerah penerima hibah.
2. Penentuan besaran dana pendamping oleh pemerintah daerah, jika dipersyaratkan.
3. Penggunaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyusun peta kapasitas fiskal daerah, dari daerah provinsi atau kabupaten/kota, pelaksanaannya lewat 2 tahap. Di antaranya,

menghitung kapasitas fiskal daerah provinsi/kabupaten/kota, lalu menghitung indeks kapasitas fiskal daerah provinsi/kabupaten/kota.

Pada saat ini, fenomena umum dalam bidang keuangan daerah yang dihadapi oleh sebagian besar pemda di Indonesia adalah relatif kecilnya peranan (kontribusi) Pendapatan Asli Daerah (PAD) didalam struktur APBD. Dengan kata lain, peranan/kontribusi penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk sumbangan dan bantuan, bagi hasil pajak dan bukan pajak, mendominasi susunan APBD. Semakin besar PAD dibandingkan dengan bantuan yang diberikan pemerintah pusat, maka pemerintah kabupaten/pemerintah kota tersebut dapat dikatakan semakin mandiri. PAD merupakan poin utama dalam mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah. Oleh karena itu, perlu dilihat efektivitas PAD dengan membandingkan antara PAD yang dianggarkan dengan realisasi PAD. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Semakin tinggi rasio efektivitas, kemampuan daerah semakin baik (Halim: 2007).

Provinsi Sulawesi Barat sebagai salah satu daerah otonom yang masih tergolong baru, terbentuk pada tahun 2004 sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004. Sejak saat itu Provinsi Sulawesi Barat terus memacu diri untuk dapat bersaing dengan provinsi-provinsi lain khususnya dalam hal tingkat kemandirian fiskal daerahnya. Namun kenyataan yang terjadi adalah tingkat kemandirian fiskal daerah Provinsi Sulawesi Barat sejak tahun 2016 hingga tahun 2021 masih berada pada kategori rendah dan sangat rendah. berikut tabel tingkat kemandirian fiskal daerah Provinsi Sulawesi Barat dan 6 Kabupaten yang ada di Sulawesi Barat:

Tabel 1.1  
Indeks Kapasitas Fiskal Daerah di Provinsi Sulawesi Barat

No	Provinsi/ Kabupaten	Tahun						Rata- rata	Kategori
		2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	Sulawesi Barat	0,49	0,25	0,246	0,189	0,269	0,179	0,271	Sangat rendah
2	Mamuju	0,40	0,62	0,633	0,617	0,544	0,693	0,585	rendah
3	Majene	0,38	0,36	0,343	0,509	0,416	0,436	0,407	Sangat rendah
4	Polewali Mandar	0,20	0,63	0,740	0,680	0,645	0,753	0,608	rendah
5	Mamasa	0,47	0,47	0,509	0,385	0,420	0,361	0,436	Sangat rendah
6	Pasangkayu	1,49	0,45	0,575	0,504	0,623	0,474	0,686	rendah
7	Mamuju Tengah	-	0,54	0,454	0,384	0,423	0,411	0,442	Sangat rendah

Sumber : PMK RI tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah

Kondisi keuangan daerah pada lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tidak terlepas dari kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditempuh, baik pengelolaan terhadap upaya-upaya optimalisasi target Penerimaan Daerah hingga mobilisasi sumber-sumber yang tersedia untuk percepatan pelaksanaan program prioritas pembangunan melalui Pengeluaran Daerah. Secara umum kinerja pelaksanaan APBD Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016-2022 menunjukkan peran APBD sebagai stimulus kinerja pembangunan daerah telah berkontribusi dalam mendukung pencapaian target-target Indikator Kinerja Utama sesuai yang ditargetkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

Sebagai faktor penting dalam mencapai tingkat kemandirian fiskal daerah yang diharapkan, Perkembangan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mengalami progress yang baik dengan ditandai peningkatan dari tahun ke tahun. Sepanjang tahun anggaran 2018–2021, pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan perkembangan dan pertumbuhan yang baik yaitu dari Rp. 1,819 Triliun lebih pada tahun 2018 menjadi Rp. 1,855 Triliun lebih pada tahun 2021 atau mengalami kenaikan rata-rata pertumbuhan sebesar 1 persen. Perkembangan Pendapatan daerah

Provinsi Sulawesi Barat khususnya pada sektor pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus kurun waktu Tahun Anggaran 2016–2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1.2**  
**Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah (PAD, DBH, DAU, DAK)**  
**Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016-2021**

No	Pendapatan Daerah	2016 Rp (Juta)	2017 Rp (Juta)	2018 Rp (Juta)	2019 Rp (Juta)	2020 Rp (Juta)	2021 Rp (Juta)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
1	Pendapatan Asli Daerah	277,686	299,021	301.499	345.208	351.282	349.318	4,84
2	Dana Bagi Hasil	28,853	25,657,	18.969	13.152	16.257	17.135	-7,76
3	Dana Alokasi Umum	925,147	977,903	1.025.033	1.064.068	968.832	970.759	1,12
4	Dana Alokasi Khusus	410,156	168,336,	453.507	574.824	679.440	495.404	25,66

*Sumber: BPKPD Provinsi Sulawesi Barat*

Berdasarkan tabel 3.1, terlihat bahwa dalam kurun waktu 6 tahun (2016-2021) telah terjadi pertumbuhan pendapatan daerah dari sektor PAD, DBH, DAU dan DBH dengan jumlah rata-rata sebesar 5,9 persen per tahunnya.

Khusus Pada sektor Pendapatan Asli Daerah, berdasarkan data pada tabel 3.1 menunjukkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2016–2021 menunjukkan tren meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,8 persen dari sebesar Rp.301.499.588.174,52,- pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp.349.318.511.432,59 pada tahun 2021. Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Barat bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Barat kurun waktu Tahun 2018-2021 dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: BPKPD Provinsi Sulawesi Barat 2022

Sedangkan pertumbuhan pendapatan Asli Daerah pada 6 Kabupaten di Sulawesi Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

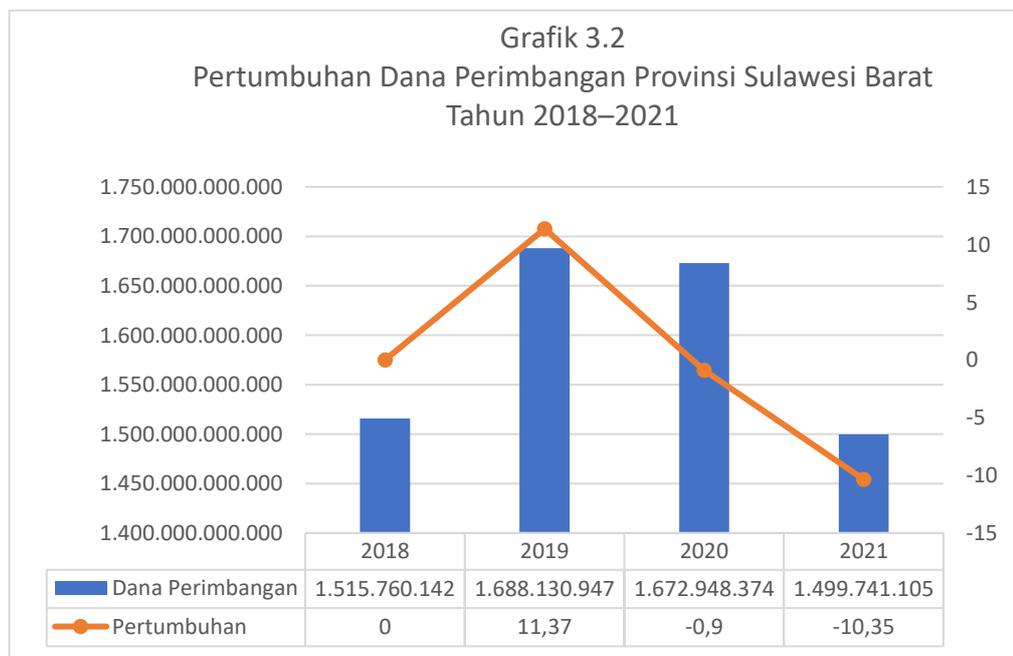
**Tabel 1.3**  
**Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah**  
**Kabupaten di Sulawesi Barat Tahun 2016-2021**

No	Kabupaten	2016 Rp (juta)	2017 Rp (juta)	2018 Rp (juta)	2019 Rp (juta)	2020 Rp (juta)	2021 Rp (juta)	Rata-rata pertumbuhan (%)
1	Mamuju	66,80	74,02	75,43	80,12	72,71	58,59	-1,95
2	Majene	50,62	83,24	89,32	65,55	77,64	85,13	14,64
3	Polewali Mandar	126,05	203,22	145,97	173,71	211,99	260,71	19,41
4	Mamasa	54,35	58,85	63,13	31,93	31,14	16,64	-16,58
5	Pasangkayu	27,63	52,52	32,21	44,49	39,54	41,20	16,52
6	Mamuju Tengah	17,17	36,71	43,82	32,56	27,86	33,82	22,89

Sumber: <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>

Selanjutnya pada sumber pendanaan yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), selain bertujuan untuk membantu Daerah dalam

mendanai kewenangannya juga dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar Daerah. Ketiga komponen Dana Perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah dan merupakan satu kesatuan yang utuh. Berdasarkan data pertumbuhan realisasi APBD Tahun Anggaran 2018–2022 pada Tabel 3.1, menunjukkan bahwa dana perimbangan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 0,04 persen dimana pada tahun 2018 sebesar Rp. 1,515 Triliun menjadi sebesar Rp. 1.499 Triliun pada tahun 2021. Pertumbuhan Dana Perimbangan selama tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada grafik berikut ini :



*Sumber: BPKPD Provinsi Sulawesi Barat 2022*

Pembangunan Daerah dilaksanakan dengan biaya yang tidak sedikit sehingga peningkatan pembangunan daerah akan meningkatkan pengeluaran pemerintah. Peningkatan pengeluaran pemerintah akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Untuk dapat memenuhi pengeluaran pemerintah, baik Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota harus

dapat menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan tidak bisa hanya dengan mengandalkan dana perimbangan dari pusat.

Kemajuan suatu daerah dipengaruhi oleh seberapa baik pemerintah daerah tersebut mengelola keuangan daerahnya. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip *value for money* serta partisipasi, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Rostow dan Musgrave (1996) menjelaskan bahwa salah satu unsur pertumbuhan ekonomi adalah pembentukan modal berupa mesin-mesin, jalan raya dan infrastruktur lainnya. Belanja modal merupakan pengeluaran yang manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran dan dapat menambah aset pemerintah yang selanjutnya meningkatkan biaya pemeliharaan (Mardiasmo, 2009).

Belanja modal menurut PP Nomor 12 tahun 2019 merupakan pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh pemerintahan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi masa manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja modal yang digunakan oleh pemerintahan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya meliputi: a) Belanja tanah b) Belanja peralatan dan mesin c) Belanja bangunan dan gedung d) Belanja jalan, irigasi dan jaringan e) Belanja aset tetap lainnya f) Belanja aset lainnya.

Menilik kondisi di atas, dimana tingkat Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Barat yang cenderung menurun dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional, menimbulkan pertanyaan apakah ada hubungan yang terjadi antara tingkat pertumbuhan ekonomi yang diperoleh dengan usaha peningkatan penerimaan PAD yang berimplikasi pada tingkat kemandirian keuangan daerah. Hal ini untuk melihat apakah desentralisasi fiskal khususnya melalui mekanisme dana transfer sudah mendorong atau

malahan mendisinsentif peningkatan kapasitas daerah, termasuk dalam hal signifikansi pendapatan asli daerah tersebut. Dengan melihat bagaimana dampak PAD dan dana transfer terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Sulawesi barat, hal ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk merumuskan suatu mekanisme yang mendukung terciptanya penguatan dalam rangka peningkatan kemandirian keuangan daerah yang diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Berangkat dari uraian diatas, maka pada penelitian ini penulis ingin melihat adanya pengaruh kemandirian keuangan daerah dan pengeluaran pemerintah terhadap Belanja Modal dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Disamping itu, perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Tiana Raharni Putri (2022) yang melakukan penelitian tentang Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor Tahun 2015-2021 yaitu penelitian ini menambahkan variabel Dana Perimbangan. Berdasarkan uraian tersebut diatas, dilakukan penelitian dengan judul: "Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat".

## **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Apakah ada pengaruh tingkat Kemandirian Keuangan Daerah terhadap belanja modal di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2013-2019?
- b. Apakah ada pengaruh dana perimbangan terhadap belanja modal di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2013-2019?
- c. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2013-2019?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang akan dilakukan adalah :

- a. Untuk menganalisis pengaruh tingkat Kemandirian Keuangan Daerah terhadap belanja modal di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2013-2019.
- b. Untuk menganalisis pengaruh dana perimbangan terhadap belanja modal di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2013-2019.
- c. Untuk menganalisis pengaruh Belanja Modal terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat tahun 2013-2019.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Teori dan Konsep**

##### **2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi**

Teori Ekonomi Klasik yang dikemukakan Adam Smith menyatakan pertumbuhan ekonomi bergantung pada pertumbuhan penduduk dengan kata lain penambahan penduduk akan meningkatkan output produksi. Teori Klasik ini berkembang menjadi Teori Neoklasik dikemukakan oleh Harrod Domar dan Robert Solow. Model Harrod-Domar mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh pembentukan modal oleh karena itu modal harus dipakai secara efektif, sedangkan Solow mengembangkan model Harrod-Domar ini menyatakan bahwa faktor tenaga kerja dan teknologi masuk ke dalam model pertumbuhan, oleh karena itu pertumbuhan ekonomi merupakan rangkaian kegiatan yang bersumber pada manusia, akumulasi modal dan pemakaian teknologi modern (Mankiw, 2007)

Menurut Mankiw (2007), PDB sering dianggap sebagai ukuran terbaik dari kinerja perekonomian yang tujuannya adalah meringkas aktivitas ekonomi dalam suatu nilai uang tertentu selama periode waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai dari penggunaan banyak tenaga tenaga kerja, tidak menghasilkan pertumbuhan pendapatan per kapita, namun jika pertumbuhan ekonomi dicapai dari daerah ke pusat.

Indikator pertumbuhan ekonomi menurut Sjafrizal (2014:156) tingkat pertumbuhan ekonomi daerah dapat dilakukan dengan melihat peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang dapat dihitung menggunakan formula sederhana, membandingkan antara nilai PDRB dengan harga konstan pada tahun  $t$  dengan nilai PDRB tahun sebelumnya.

Apabila suatu daerah memiliki tingkat kemandirian keuangan daerah yang tinggi, diharapkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut juga akan meningkat (Suci & Asmara, 2014).

Secara umum diyakini bahwa desentralisasi fiskal adalah cara yang berhasil untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran dan pendapatan publik (Stansel, 2005). Desentralisasi fiskal juga merupakan cara untuk mengalihkan kewenangan fiskal ke tingkat pemerintahan daerah dan membatasi kendali pemerintah pusat (Hanif dkk, 2014). World Bank (2000) juga menyatakan bahwa desentralisasi fiskal dapat menjadi alat untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Beberapa ekonom mengemukakan bahwa pemberlakuan desentralisasi fiskal untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah sebagai sarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang berdasarkan pandangan bahwa hal itu mengarah pada alokasi sumber daya yang lebih baik dan sektor publik yang lebih produktif, dan mungkin lebih kecil. Ini mungkin karena kebijakan yang ditentukan secara lokal lebih mampu memperhitungkan kondisi regional dan lokal dalam penyediaan barang publik, seperti infrastruktur dan pendidikan, atau bahwa persaingan di antara berbagai tingkat pemerintahan mendorong tarif pajak yang lebih rendah dan produksi barang publik yang efisien di bawah kendala pendapatan (Thornton, 2007).

### **2.1.2 Kemandirian Keuangan Daerah**

Menurut Mamesah dalam Halim (2007 : 23), keuangan daerah dapat diartikan sebagai “semua hak dan kewajiban yang dapat yang dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan

perundangan yang berlaku”. Menurut Halim (2007:232), Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman.

Rasio kemandirian keuangan daerah (selanjutnya disingkat dengan KKD) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, sebagai balas jasa bagi masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Halim dan Damayanti, 2007).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah pasal 1 ayat (1), yaitu Kapasitas Fiskal adalah gambaran kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) untuk membiayai tugas pemerintahan setelah dikurangi belanja pegawai dan dikaitkan dengan jumlah penduduk miskin.

Selanjutnya, pada ayat (2) disebutkan bahwa Peta Kapasitas Fiskal Daerah yang selanjutnya disebut Peta Kapasitas Fiskal adalah gambaran kapasitas fiskal yang dikelompokkan berdasarkan indeks kapasitas fiskal daerah. Kemudian pada ayat (3), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Perhitungan kapasitas fiskal daerah provinsi didasarkan pada formula sebagai berikut :

$$KFD_{\text{provinsi}} = \text{Pendapatan} - [\text{Pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan} + \text{belanja tertentu}]$$

Keterangan :

$KFD_{\text{provinsi}}$  = Kapasitas Fiskal Daerah suatu provinsi

Kemudian untuk menghitung indeks kapasitas fiskal daerah provinsi itu sendiri digunakan formula sebagai berikut

$$IKFD_{\text{provinsi-i}} = \frac{KFD_{\text{provinsi-i}}}{(\sum KFD_{\text{provinsi}})/n}$$

Keterangan :

- $IKFD_{\text{provinsi-i}}$  = Indeks Kapasitas Fiskal Daerah suatu provinsi
- $KFD_{\text{provinsi-i}}$  = Kapasitas Fiskal Daerah suatu provinsi
- $\sum KFD_{\text{provinsi}}$  = Total Kapasitas Fiskal Daerah suatu provinsi
- n = 34 daerah provinsi

Mengikuti IKFD itu, daerah digolongkan menjadi 5 jenis kapasitas fiskal daerah. Diawali dengan rentang sangat rendah hingga sangat tinggi. Indeks kapasitas fiskal daerah sebagai dasar pada pengelompokkan kemampuan keuangan daerah dalam penyusunan peta kapasitas fiskal daerah. Dalam perhitungan kapasitas fiskal daerah dan IKFD kabupaten/kota terdapat formula yang serupa.

Rentang IKFD	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
$IKFD < 0,275$	sangat rendah
$0,275 \leq IKFD < 0,458$	rendah
$0,458 \leq IKFD < 0,863$	sedang
$0,863 \leq IKFD < 1,745$	tinggi
$IKFD \geq 1,745$	sangat tinggi

### **2.1.3 Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut UU No.33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang diperoleh dari sumber-sumber penerimaan di daerah. Pelaksanaan pembangunan di daerah membutuhkan dana yang cukup banyak dan dalam hal ini daerah tidak bisa hanya menggantungkan dana perimbangan dari pusat, sehingga daerah harus dapat menggali potensi daerahnya untuk dapat digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan daerah dalam era otonomi daerah demi meningkatkan pendapatannya. Dengan adanya PAD, maka dapat dijadikan indikator penting untuk menilai tingkat kemandirian Pemerintah Daerah di bidang keuangan. Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari: Pajak daerah merupakan salah satu elemen PAD yang memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan PAD.

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam (Bastian, 2002). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Identifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal (Elita, 2007).

Menurut Mardiasmo (2009:132), efektifitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektifitas

merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Sedangkan Menurut Mahmudi (2015:114), Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Rasio Efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD atau yang dianggarkan sebelumnya.

Adapun rumus rasio Efektifitas menurut Mahmudi (2015:141) sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Oleh sebab itu, peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat menentukan kemandirian keuangan pada suatu daerah. Pada prinsipnya, semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maka semakin tinggi tingkat kemandirian daerah tersebut yang artinya ketergantungan daerah tersebut terhadap pemerintah pusat semakin rendah. Apabila suatu daerah memiliki tingkat kemandirian keuangan daerah yang tinggi, diharapkan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut juga akan meningkat (Suci & Asmara, 2014).

#### **2.1.4 Dana Perimbangan**

UU Nomor 33/2004 pada pasal 1 ayat 19 menjelaskan dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi serta pasal 10 ayat 1 menjelaskan dana perimbangan terdiri atas tiga, yaitu dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil.

Wulansari (2015) dan Ferdian (2013) mengemukakan hasil penelitiannya yang menyatakan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah yang artinya jika Dana Perimbangan meningkat maka Belanja Daerah juga meningkat. Berdasarkan dari penelitian sebelumnya mendorong peneliti untuk menguji kembali apakah variabel Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

Nasution (2015) menjelaskan bahwa, Dana transfer/bantuan pemerintah daerah merupakan sumber pendapatan yang berasal dari anggaran untuk mendukung pelaksanaan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah terutama dilakukan dengan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Sari, et al. (2014) menjelaskan bahwa “Dana perimbangan adalah modal yang berasal dari perolehan APBN yang diperuntukkan bagi daerah dalam upaya membiayai kepentingan daerah sebagai bentuk pengimplementasian asas desentralisasi”.

Sumber-sumber dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus (Aprizay dkk, 2014).

Kemandirian keuangan pemerintah daerah merupakan kebalikan dari besarnya rasio penerimaan transfer di dalam pemenuhan pembelanjaan pemerintah. Belanja daerah sangat dipengaruhi oleh transfer dari pemerintah pusat (Abdullah & Halim, 2003). Perimbangan keuangan dengan dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menjadi insentif bagi pemerintah daerah untuk membiayai belanja daerah (Sasana, 2011).

### **2.1.5 Belanja Modal**

Menurut (Halim, 2007) salah satu pengeluaran pemerintah adalah belanja modal yang memiliki pengertian pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal termasuk: belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.

Menurut (Erlina & Rasdianto, 2013), Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Menurut Nurjoni (2008) menyatakan bahwa belanja modal utamanya terkait dengan belanja infrastruktur memegang peranan penting dalam menggerakkan roda pertumbuhan ekonomi. Pembangunan sektor infrastruktur dipandang mampu menjadi pondasi bagi pembangunan ekonomi selanjutnya. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, lebih merata dan lebih mampu mensejahterakan masyarakat.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud.

Selanjutnya Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 dijelaskan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. penggunaan belanja modal antara lain dipergunakan untuk: 1. Belanja modal tanah, 2. Belanja modal peralatan dan mesin, 3. Belanja modal gedung dan

bangunan, 4. Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, 5. Belanja modal lainnya, dan 6. Belanja modal badan layanan umum (BLU).

## 2.2 Tinjauan Empiris

Penelitian yang berhubungan dengan Belanja Modal Daerah yang dikaitkan dengan Kemandirian Keuangan Daerah dan Dana Perimbangan telah banyak dilakukan, diantaranya adalah oleh Royda (2016) yang meneliti tentang Pengaruh Efisiensi dan Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Belanja Modal di Bangka Belitung. Variable yang digunakan adalah tingkat kemandirian keuangan daerah dan Efisiensi Keuangan daerah. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa secara simultan, variabel independen pada periode penelitian yakni 2004-2013 mempengaruhi belanja modal secara signifikan pada periode tersebut. Sedangkan besarnya nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) menunjukkan bahwa sebesar 83,74 persen belanja modal dijelaskan oleh variabel yang ada pada penelitian, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Yasinta Aulia Fajrin (2018) yang meneliti tentang pengaruh kemandirian keuangan daerah, efektivitas keuangan daerah, dan efisiensi keuangan daerah terhadap alokasi belanja modal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik yang digunakan untuk mencari nilai persamaan regresi linear berganda yaitu dengan analisis Least Squares (kuadrat terkecil) dengan meminimalkan jumlah dari kuadrat kesalahan, dengan menggunakan alat bantu komputer program SPSS. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Kemandirian Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Efektivitas Keuangan Daerah berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal dikarenakan nilai signifikansi uji parsial ( $t$ ) 0,324 lebih besar dari 0,05. Efisiensi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Rendy Alvaro dan Adhi Prasetyo (2020) meneliti tentang pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi pada provinsi di Indonesia. Berdasarkan hasil pengujian dan analisa yang dilaksanakan terhadap data dari 33 provinsi di Indonesia selama tahun 2010-2018 dapat disimpulkan bahwa PAD, DAK dan DBH berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan DAU tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Untuk pertumbuhan ekonomi ditemukan berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal. Di samping itu, pada pertumbuhan ekonomi memoderasi PAD dan DAU ditemukan berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Sedangkan pertumbuhan ekonomi memoderasi DAK dan DBH berpengaruh negatif signifikan terhadap belanja modal.

Penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Belanja Modal adalah yang dilakukan oleh Franciska Yuniarti (2018) yaitu analisis pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal di wilayah Malang Raya (studi kasus 3 kabupaten/kota di Malang Raya tahun 2007-2016). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap belanja modal di wilayah Malang Raya tahun 2007-2016. Estimasi dilakukan dengan regresi data panel yang menggunakan program EViews 10. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, DBH berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap belanja modal. Secara keseluruhan PAD, DAU, DAK, dan DBH berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di wilayah Malang Raya pada tahun 2007-2016.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Meta Prihastanti, Bapak Drs. Dadang Rachmat Ak., M.Ak., CA (2020) atas Pengaruh Pendapatan Asli

Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan (Daper) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 2014 – 2017 menunjukkan bahwa adanya pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara simultan berpengaruh signifikan pada belanja modal, dari hasil uji t menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Rian Septia Aditya Pradana (2016) melakukan penelitian Pengaruh Pendapatan Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan dan Belanja Modal (Studi Kasus di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah tetapi, tidak meningkatkan belanja modal, karena PAD secara rata-rata hanya memberikan kontribusi antara 5% - 10% terhadap penerimaan daerah, sedangkan dana perimbangan dapat meningkatkan kinerja keuangan dan belanja modal.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Kumba Digidowiseiso (2021) yang menganalisis tentang Pengaruh Belanja Modal dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi D. I. Yogyakarta Tahun 2012-2019 dengan Populasi dan Rata-Rata Lama Sekolah Sebagai Variabel Kontrol. Hasil dari penelitian ini memperoleh bahwa variabel belanja modal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan pada variabel investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Bila dibandingkan hasil penelitian yang menggunakan variabel kontrol (populasi dan rata-rata lama sekolah) maka akan menunjukkan bahwa investasi mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kemudian Tiana Raharni Putri (2022) melakukan penelitian tentang Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor Tahun 2015-2020. Penelitian ini

menggunakan data kuantitatif dan sekunder yang bersumber dari laporan situs resmi Kota Bogor menggunakan metode purposive sampling. Metode analisis yang digunakan adalah Uji Asumsi Klasik yang terdiri dari Uji Normalitas, Uji Multikolonieritas, Uji Heteroskedastisitas dan Uji Autokorelasi, Analisis Regresi Linear Berganda dan Uji Hipotesis yang terdiri dari Uji Determinasi, Uji Statistik F dan Uji Statistik t dengan menggunakan SPSS versi 25. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Hasil pengujian secara simultan menyatakan bahwa Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dalam menyusun kebijakan strategi yang efektif dan efisien untuk kegiatan terhadap stimulus Pertumbuhan Ekonomi di Kota Bogor.